

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SESUA KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

Aprianus¹

ABSTRAK

Aprianus, Program Studi Administrasi Negara Universitas Mulawarman 2015. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Pembimbing I Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Pembimbing II Dr. Santi Rande, M.Si.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembanguna di Desa Sesua.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Motivator dalam Pelaksanaan Pembangunan dapat dikatakan berjalan sesuai yang diinginkan dan kepala desa memberikan banyak pengaruh yang positif dalam program yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kepala desa sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator yang diartikan sebagai penyambung lidah, sebagai nara sumber, sebagai pemberi fasilitas, dan pemecah suatu masalah yang ada dikalangan masyarakatnya, namun peran kepala desa sebagai fasilitator kurang berjalan dengan baik dikarenakan kemampuan yang sangat minim yang di miliki oleh pemerintah desa itu sendiri. Sebagai mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai penggerak organisasi kepala desa sudah berusaha melaksanakan tugasnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan meskipun ada juga masyarakatnya dengan acuh tak acuh terhadap pembangunan dan program yang diberikan, namun belum maksimalnya melaksanakan tugasnya sebagai pengerak organisasi pemerintah desa. Saran dari penulis perlu ditingkatkan lagi koordinasi baik staf atau masyarakat, dan lebih sering turun ke lapangan menggerakkan/memotivasi masyarakatnya.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa Sebagai Motivator, Fasilitator dan Mobilisator

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: aprianus67@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan Nasional.

Tujuan dari Otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Dan salah satu caranya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan; sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan Nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya.

Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan garis depan dalam pemerintah Indonesia sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Daerah pedesaan merupakan daerah-daerah tempat pesebaran kegiatan-kegiatan pertanian dan industri-industri kecil. Pada tingkat perkembangan sekarang ini, dimana ekonomi Indonesia masih bertolak dengan ekonomi pertanian padahal nilai potensil terbesar untuk memajukan pemabngunan ekonomi terletak didaerah pedesaan. Dengan berkembangnya kegiatan- kegiatan

disektor industri, barulah terjadi pergeseran titik berat nilai potensial kearah daerah perkotaan.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutny disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dilaksanakan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai badan eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legeslatifnya. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu pembangunan tentunya memiliki pelaku atau subyek pelaksanaan yang akan melaksanakan pembangunan tersebut.

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan pada tahun 1999, yang pada tahun 2013 penduduknya 253.602 juta jiwa seluruhnya tersebar di 12 Kecamatan dan atas 109 Desa. Karena merupakan salah satu kabupaten yang baru melakukan pemekaran sehingga sampai saat sekarang ini pemerintah masih melakukan berbagai macam program pembangunan di segala bidang dan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunannya adalah Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, banyak peran yang sangat penting dalam penyelenggaraannya termasuk peran dari kepala desa, yang merupakan pemimpin dari desa yang merupakan ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa menjadi hal yang utama, disebabkan karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang dapat membuat keputusan, mengarahkan menampung aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena hal tersebut pelaksanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi dilapangan dalam peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua yaitu masih kurang efektifnya peran kepala desa dapat terlihat dari segi kurangnya koordinasi antar masyarakat, kurangnya kerjasama dan informasi kepada masyarakat yang jelas tentang pembangunan yang ada di Desa Sesua sehingga terdapat persepsi yang negatif juga adanya rasa kurang puas dari masyarakat maka berdampak pada lambatnya pelaksanaan pembangunan. Dianataranya dalam hal pembuatan jalan tani yang pada saat ini masi timbunan tanah, pembuatan jalan baru yang ada di bagian Rt 2 Desa Sesua yang suda dibangun baru beberapa tahun suda rusak, saluran irigasi/parit jalan yang tidak ada, perbaikan lingkungan desa,

dan tidak adanya pendampingan/pelatihan terhadap masyarakat tentang program-program lain yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah desa sesuai.

Dengan demikian peran dari seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sesuai Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
3. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua.

KARANGKA DASAR TEORI

Kepemimpinan

Peran seorang pemimpin merupakan sangat penting dalam sebuah organisasi karena pemimpinlah yang memandu menuntun, mengarahkan, membimbing sebuah organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.

Kemudian menurut James L. Gibson, dkk dalam Harbani Pasolong (2007:110) kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan.

Fungsi Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (1983:93) fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Macam-macam Kepemimpinan

Menurut Kartono (1983:9-11) Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjukkan sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.

menurut Kartono (1983:9-11) Pemimpin informal ialah, orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Peran Kepemimpinan

Adapun peran Kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (2000:42) sebagai berikut :

1. Motivator

Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Motivasi bisa diberikan dari seorang individu kepada kelompok atau kelompok kepada individu ataupun dari kelompok ke kelompok. Motivasi diberikan pula oleh orang berkedudukan atau statusnya lebih tinggi dan berwibawah. Mereka memiliki unsur-unsur keteladanan dan panutan masyarakat.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator disini adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat, arahan atau pendapat. Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

3. Mobilisator

Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Pengertian Peran

Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring dalam mengatur perilaku bawahan.

Pengertian Pembangunan

Menurut Makmur (2009: 254), mengatakan pembangunan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, pemerintah, negara dan bangsa dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan kedinamisan yang dapat menciptakan kestabilan dalam berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Effendi (2002:48) menyebutkan pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan pengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Pembangunan Manusia

Menurut Zulkarimen (1998:64) sesungguhnya yang hendak dibangun adalah manusia. Karena itu hasil ataupun manfaat pembangunan harus pada manusianya. Sedangkan yang lain-lain merupakan alat untuk tercapainya tujuan, yaitu kemanfaatan pada diri manusia. Dari sinilah berasal istilah *humandevlopment* atau pembangunan manusia yang diartikan sebagai memperbesar pilihan-pilihan yang tersedia bagi manusia.

Pengertian Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa dan adat atau yang sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa

Menurut Taliziduhu Ndraha (2002:9) bahwa pembangunan desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan diadakan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada sumbangan Nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Fokus Penelitian ini adalah

1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan :
 - a. Kepala desa sebagai motivator.
 - b. Kepala desa sebagai fasilitator; dan
 - c. Kepala desa sebagai mobilisator.
2. Faktor faktor penghambat peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling dan Insidental Sampling*. Penulis menjadikan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dan beserta staf kepala desa sebagai *key informan* dan penulis menjadikan masyarakat setempat yang merasakan pembangunan di Desa Sesua sebagai infoman.

Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyelesaikan situasi dan kondisi dilapangan, penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. *Library Research* (Penelitian melalui kepustakaan) Teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sumber bacaan lainnya sebagai tinjauan pustaka yang memuat tentang beberapa pendapat pakar yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung penulisan maupun pembahasan skripsi ini.
2. *Field Work Research* (Penelitian Langsung kelapangan), Sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan atau penelitian langsung kelapangan atau lokasi penelitian :
 - a. Observasi pengumpulan data dengan melakukan pengamat dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
 - b. Informan (wawancara), orang yang menguasai permasalahan memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi.
 - c. Dokumentasi, pengumpulan data atau arsip yang relevan.

Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas tiga komponen, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten induk Bulungan berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Wilayah Kebijakan Mengatur Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Kabupaten Malinau mempunyai luas wilayahnya sebesar 39.766,33 km. Berdasarkan data, Jumlah penduduk di Kabupaten Malinau berjumlah 253.602 jiwa data tahun 2013 tersebar di 12 kecamatan 109 desa, yang mayoritas penduduk Suku Dayak yaitu Tidung, Dayak Lundayeh, Dayak Belusu, Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Abay, Dayak Tagol.

Desa Sesua

Desa Sesua memiliki luas wilayah \pm 280.500 ha, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Paris.Yuyou, Desa Sesua terletak 16 KM dari Pusat Pemerintah Kecamatan dan 10 KM jarak ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Secara administratif batas wilayah Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Kuala Lapang dan Tanjung Lapang
2. Sebelah Selatan : Desa Seputuk/ KTT
3. Sebelah Timur : Sempayang dan Batu Lidung
4. Sebelah Barat : Punan Bengalun

Struktur Organisasi Sekretariat Desa Sesua

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa selain didukung oleh organisasi kemasyarakatan yang ada didalam desa, Sektreatris Desa atau unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa merupakan unsur utama yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa. Hal tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjelaskan Sekretariat Desa yang ada di Desa Sesua adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yang ada di Desa Sesua. Sekretaris Desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Adapun susunan organisasi sektretaris desa sesua yaitu :

- a. Kaur. Pemerintahan
- b. Kaur. Umum
- c. Kaur. Pembangunan

Visi dan Misi Desa Sesua

Berikut ditampilkan Visi dan Misi Desa Sesua :

1. Visi desa sesua

Terwujudnya Desa Sesua yang Maju Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun.

2. Misi Desa Sesua

- a. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
- b. Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia
- c. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Pedesaan
- d. Memajukan Ekonomi Desa

HASIL PENELITIAN

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di Desanya dan juga mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantu dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini penulis menyajikan pembahasan meliputi beberapa kreteria dalam pelaksanaan tugasnya yakni sebagai Motivator, Fasilitator, dan sebagai Mobilisator.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Motivator Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala desa sebagai motivator atau yang diartikan merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Maka dapat diketahui bahwa kepala desa sesua melaksanakan kegiatan pembangunan dan kegiatan apa saja yang diprogramkan selalu melibatkan masyarakat dan juga bawahannya karena kepala desa tidak bisa mengambil keputusan sendiri harus juga melalui keputusan bersama masyarakat desa demi berjalannya kegitan dengan baik. Karena keputusan ini dilakukan bersama-sama hal yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan akan dapat dikurangi, demikian pula partisipasi semua pihak akan benar-benar terlibat dari pimpinan hingga pemerintah desa. Oleh karena itu bentuk motivasi melalui pendekatan partisipatif dipandang cara yang efektif untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan pemerintah.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sebgai Fasilitator Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara peran kepala desa sebagai fasilitator yang diartikan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator disini adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan subtantif dan teknis serta memiliki ketrampilan menerapkan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasehat, arahan atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Penulis menyimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai fasilitator kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam tugasnya memfasilitasi masyarakat dan bawahannya, baik memfasilitasi pertemuan-pertemuan pemerintah kecamatan dan kabupaten, memfasilitasi program yang di selenggarakan seperti program kelompok tani, pembibitan, peternakan. Adapun persepsi dari masyarakat peran kepala desa

sebagai fasilitator yaitu belum sepenuhnya dilaksanakan mengingat keterbatasan SDM aparatur desa termasuk kepala desanya.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Mobilisator Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara peran kepala desa sebagai mobilisator yang diartikan orang yang menggerakkan atau mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Penulis menyimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai penggerak organisasi Pemerintahan Desa, kepala desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai penggerak organisasi dari hasil wawancara penulis kepada Aparat Pemerintah Desa, kepala desa selalu menggerakkan masyarakatnya untuk ikut serta dalam pembangunan dengan cara pemerintah desa membuat suatu pertemuan/ musrembangdes dan melibatkan masyarakatnya, dan membuat kegiatan misalnya perlombaan-perlombaan untuk masyarakatnya. Tetapi berbeda juga yang disampaikan oleh masyarakat desa sesuai dari hasil wawancara penulis bahwa kepala desa memang sudah melaksanakan tugasnya sebagai penggerak organisasi tetapi belum maksimalnya perannya sebagai penggerak pemerintah desa, faktor dari keterbatasan SDM baik itu Pemerintah Desa maupun dari masyarakatnya.

Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan faktor penghambat Peran kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, beberapa faktornya sebagai berikut :

1. Faktor penghambat peran kepala desa sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan desa :
 - a. Komunikasi antar warga dengan aparat yang sangat kurang seperti komunikasi secara intensif.
 - b. Faktor SDM dan faktor Manusia, baik itu dari Pemerintah Desa Sesuai, maupun dari masyarakatnya.
2. Faktor penghambat peran kepala desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan desa :
 - a. Kemampuan aparatur dalam penggunaan dan pengoprasian alat-alat computer sangat kurang sehingga untuk memberikan tugas yang bersifat administratif kepada bawahan akan mendapat suatu kesulitan sehingga segala urusan penting hanya berharap kepada Kaur.umum dan Sekretaris saja.
 - b. Masalah pembebasan lahan yang sulit dilakukan oleh aparat pemerintah desa untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan dan pembangunan gedung.
3. Faktor penghambat peran kepala desa sebagai mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan desa :
 - a. Warga tidak selalu mengikuti apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju.

- b. Penyampain aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat banyak ditampung oleh kepala desa tetapi pelaksanaan yang lambat dan juga ada yang tidak dilaksanakan, berdasarkan wawancara kepada aparat pemerintah desa, bahwa dari desa sudah berusaha mau melaksanakan aspirasi masyarakatnya tetapi kendala disini bahwa dari kecamatannya sendiri yang menjadi kendala, karena pihak kecamatan juga menyaring aspirasi tersebut tidak semua aspirasi yang disetujui oleh pihak kecamatan. Kendala juga muncul dari bagian keuangan, yang lambat mengeluarkan dana untuk pelaksanaan pembangunan sehingga lambatnya pelaksanaan pembangunan.

PEMBAHASAN.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berbicara tentang peran kepala desa sebagai pemimpin sangatlah penting untuk kemajuan desa yang dipimpinya, karena kepemimpinan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, kepala desa harus bisa berperan sesuai jabatannya yang sudah dipercayai oleh masyarakat kepadanya untuk mengayomi anggota bawahannya dan masyarakat. Hasil dari penelitian penulis akan membahas tentang peran seorang kepala desa menurut Tjokroamidjojo (2000:42) sebagai berikut :

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Motivator Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Tjokroamidjojo (2000:42). Peran kepala desa sebagai motivator yang merupaka dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang di motivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Penulis melakukan penelitian wawancara baik kepada masyarakat maupun kepada aparat pemerintah desa, peran kepala desa sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sesua dari hasil penelitian, kepala desa suda melaksanakan perannya sebagai motivator, yang memberi dorongan kepada masyarakatnya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, dalam kepemimpinannya kepala desa memberikan banyak pengaruh yang positif dengan berlaku bujaksana dan senantiasa terlibat dalam program yang direncanakan, dengan kata lain melihat tindakan yang dilakukan pemimpin yang aktif dalam masa jabatannya dan nasehat-nasehat ini akan menyuntikan semangat bekerja dalam diri bawahan dan masyarakat desa sehingga mau turut serta dalam aktivitas pembangunan yang ada.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Fasilitator Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat diketahui peran kepala desa sebagai fasilitator menurut pengamatan masyarakat dan para stafnya ada berbagai persepsi yang di lontarkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator yang diartikan sebagai orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat

memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Menurut Tjokroamidjojo (2000:42) Fasilitator disini adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki ketrampilan menerapkan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasehat, arahan atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Dari hasil wawancara penulis dengan warga desa serta staf pemerintahan desa, tentu beliau sudah melaksanakan tugasnya, memberikan pemahaman kepada warga tentang pemabangunan, memfasilitasi terhadap pertemuan-pertemuan yang ada misalnya pertemuan dari kecamatan dan kabupaten. Kepala desa juga membantu masyarakatnya dalam memecahkan suatu masalah baik di pemerintah desa maupun permasalahan masyarakatnya, misalnya ada permasalahan pemerintah desa seperti pembebasan lahan, membawa masyarakat menghibahkan tanahnya untuk mendirikan pembangunan. Adapun program yang difasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesajtraan masyarakat yaitu melalui kelompok tani, seperti pembibitan, peternakan, dll. Namun dari pendapat dari beberapa masyarakat mengatakan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Mobilisator Pelaksanaan pembangunan Desa.

Meurut Tjokroamidjojo (2000:42) Peran kepemimpinan sebagi mobilisator yang diartikan orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna kepentingan bersama. Dari pengertian tersebut mengarahkan dan mengerakan dari hasil penelitian wawancara penulis ada beberapa persepsi yang timbul dalam penelitian ini dari hasil wawancara kepada staf bahwa peran kepala desa sebagai mobilisator kepala desa sudah melakukan tugasnya sebagai pengerak organisasi misalnya kepala desa mengadakan suatu pertemuan/musrembangdes pemerintah desa melibatkan masyarakatnya, dan kepala desa membuat suatu kegiatan perlombaan antar RT seperti RT sehat, ternak sehat, dan perlombaan lainnya. Tetapi berbeda juga yang disampaikan oleh masyarakat desa sesua sesuai dengan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai pengerak organisai tetapi belum maksimalnya kerja seorang kepala desa sebagai pengerak pemerintah desa, dan masih terlihat minim kurangnya kemampuan yang dimiliki.

Faktor Penghambat Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa sesua peran sebagai Motivator, Fasilitator, Mobilisator dalam masa jabatan kepala desa tentu mengalami ada berbagai faktor-faktor yang menghambat kerja seorang kepala desa yaitu, dari hasil penelitian faktor yang menghambat peranya adalah dari masyarakatnya sendiri yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ada yang menerima program yang di berikan dan ada juga yang tidak, adapun

permasalahan yang ada adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan gedung dan jalan dikarenakan masyarakat tidak mau menghibah tanahnya untuk suatu pembangun dan akan terjadi keterlambatan proses pembangunan. Terlihat juga faktor penghambat dari peran seorang kepala desa yaitu faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia dari aparatur desa termasuk kepala desa, sehingga masyarakat banyak yang menjadi acuh tak acuh terhadap pembangunan yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat beberapa fokus berikut ini :

1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan adalah:
 - a. Peran kepala desa sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan berjalan sesuai yang diinginkan yaitu selalu mengutamakan kepentingan bersama dan menyampaikan suatu motivasi-motivasi yang membangun masyarakat supaya ikut serta dalam pembangunan. Sebagai motivator kepala desa memberikan banyak pengaruh yang positif dalam program yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - b. Peran kepala desa sebagai fasilitator dalam pembangunan desa menurut pengamatan dan para staf dan masyarakat ada persepsi-persepsi yang di lontarkan, bahwa kepala desa sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator yang diartikan sebagai penyambung lidah, sebagai nara sumber, sebagai pemberi fasilitas, dan pemecah suatu masalah yang ada dikalangan masyarakatnya, tentu beliau sudah melaksanakan tugasnya, memberikan pemahaman terhadap warga tentang pemabangunan, memfasilitasi terhadap pertemuan-pertemuan yang ada misalnya pertemuan dari kecamatan dan kabupaten, adapun masalah yang ada adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa.
 - c. Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam pembangunan desa, sebagai penggerak organisasi kepala desa sudah berusaha melaksanakan tugasnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan meskipun ada juga masyarkatnya dengan acuh tak acuh terhadap pembangunan dan program yang diberikan.
2. Faktor Penghambat Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan, melihat dari faktor-faktor penghambat di atas salah satunya adalah faktor Sumber Daya Manusia yang kurang dimiliki baik pemerintah desa maupun masyarakat desa sesua itu sendiri dan sehingga banyak masyarakat acuh tak acuh terhadap kegiatan pembangunan desa.

Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di desa sesua, maka penulis menyarankan ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Sesua yaitu :

1. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi yang baik, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan sehingga apa yang diprogramkan oleh masyarakat seperti pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik diketahui oleh semua pihak, baik kepada masyarakat, bahawahan, BPD, dan Lembaga yang.
2. Perlunya kepala desa mengadakan program Bimtek/Pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk aparatur desa, misalnya seperti dalam memahami pengoprasian alat-alat computer yang selalu digunakan dalam pekerjaan aparat desa, sehingga pada akhirnya kemampuan aparatur desa melayani tidak berlangsung lambat dan tidak tergantung dengan satu orang.
3. Program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apa yang di inginkan oleh masyarakat, dan mengontrol setiap program yang diberikan karena ada masyarakat yang tidak menjalankan program tersebut, misalnya pembagian bibit sawit, bibit karet, ada juga yang tidak ditanam oleh masyarakat. jalan tani yang pada saat ini masi timbunan tanah, dan perbaikan-perbaikan masalah jalan disetiap perkebunan masyarakat banyak perkebunan sawit masyarakat yang gagal panen dikarenakan jalan yang tidak mendukung.
4. Mengadakan pelatihan masalah program yang diberikan seperti program tani. Agar masyarakat mengerti cara mengelola dan menjalankan program yang ada.
5. Perlunya ditingkatkan kedisiplinan aparat desa, kewenangan kepala desa adalah membina bawahannya agar suatu pekerjaan bisa dikerjakan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing.
6. Melihat masalah Pemuda atau Karang Taruna desa sesua perlunya kepala desa berkomunikasi secara mendalam, mengikuti pertemuan/rapat yang adakan oleh pemuda karang taruna untuk mengarahkan mereka sekaligus mendengarkan masalah mereka.
7. Membuat saluran Irigasi/Parit jalan Desa Sesua, Karena dari sebelum pergantian kepala desa samapai saat ini belum terlihatnya kerja untuk membuat saluran irigasi/parit jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Membangun Desa Partisipasif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bachtiar Effendi. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 1983, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Stratejik Dalam Pemerintah dan Pembangunan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

- Milles, Methew B, A. Michael Hubarman and Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analystid, A Methode Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Metodologi Pembangunan Desa*. PT. Bina Aksara Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertubuhan dan Penyelenggara Pemerintah Desa*. Ciracas, Jakarta : PT. Glora Akstra Pratama.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta, W. J. S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Rivai, veithzal. 2006, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sarapin, 1999. *Tata Pemerintah dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sumaryadi, I, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*: Cv. Citra Utama.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondan P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta PT: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sifian. 1989. *Metode Penelitian Survai*, LP3ES. Jakarta.
- Soerjono, soekanto. 2002. *Sosiologi suatu Pengantar*. Cv. Rajawali, Jakarta.
- Sudirwo, Decng. 1982. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa*. Angkasa. Bandung
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, cv.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Cv. Alfabeta: Bandung.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Widjaja. A. W, 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.